

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Mitra Post

Wilayah: Provinsi Jawa Tengah

Pemprov Jateng Siapkan Anggaran Untuk Bansos Dampak PPKM

<https://mitrapost.com/2021/07/21/pemprov-jateng-siapkan-anggaran-untuk-bansos-dampak-ppkm/>

Mitrapost.com – Pemerintah provinsi **Jawa Tengah** siapkan anggaran untuk bantuan sosial (bansos) yang merupakan antisipasi dampak PPKM.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta jajarannya untuk memastikan agar bantuan yang sudah disiapkan dapat tersalur ke masyarakat dengan tepat sasaran.

"Anggaran-anggaran itu sudah disiapkan tahun ini, jadi inilah yang mesti digas untuk disalurkan pada masyarakat," kata Ganjar ditemui di kantornya, Rabu (21/7/2021).

Terdapat total anggaran sebesar Rp418,8 miliar dari APBD Provinsi Jateng, dan Rp4,7 triliun dari APBN.

Anggaran yang telah disiapkan bersumber dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng tahun 2021, yang merupakan antisipasi dampak PPKM.

"Sudah ada alokasinya. Umpama sisi infrastruktur, ada sumbangan listrik untuk alokasi 15.000 KK. Pembangunan rehab dan distribusi rumah korban bencana alokasi 327 unit. Dari ini saja, ada Rp12,8 miliar, dan saya minta bisa ditambah," ucapnya.

Anggaran dana tersebut akan digunakan untuk program bantuan sosial diantaranya adalah beasiswa untuk siswa yang kurang mampu. Sedangkan anggaran dari pusat terdapat 7 kegiatan, diantaranya adalah bansos PKH.

"Diantaranya untuk program jambanisasi, alat bantu produksi, Kartu Jateng Sejahtera, beasiswa untuk siswa kurang mampu, hibah Kemenag, dan lainnya. Sementara anggaran dari pusat itu ada tujuh kegiatan, di antaranya BLT Dana Desa, bansos PKH, BPNT, BST, dan bantuan beras untuk 7,6 juta KK," ucapnya.

Ganjar menerangkan bahwa bantuan bagi usaha mikro sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dari target 2,8 juta.

"Sementara anggaran APBN untuk bantuan produktif usaha mikro, sudah terealisasi sebesar 1,1 juta UKM dengan target 2,8 juta. Masing-masing Rp1,2 juta. Selain itu, ada juga kartu prakerja untuk 350.000 orang dan terealisasi 194.718 orang. Ini yang saya maksud harus digas agar segera tersalurkan," terangnya.

Dari sisi ekonomi, ada anggaran total Rp24,1 miliar dari APBD Provinsi dan Rp2,2 triliun dari APBN. Untuk anggaran APBD, bantuan diberikan untuk BBM nelayan, asuransi nelayan, paket olahan ikan, cadangan beras, dan bansos paket peternakan.

Selain itu, pihaknya juga tengah Menyusun strategi refocusing. Beberapa usulan adalah alokasi bantuan sosial untuk 133.555 KK. Masing-masing akan menerima Rp200.000. Bantuan akan diberikan untuk pedagang, sopir, tukang ojek, biaya transporter, dan lainnya.

Selain itu, ada juga usulan bansos 157.795 UKM yang terdampak Covid-19. Bantuan Dinas Ketahanan Pangan sekitar Rp3,3 miliar untuk petani, Distanbun memberikan bantuan untuk 5.708 kelompok tani, dan Disperindag mengusulkan bantuan produk bahan baku industri bagi 3.500 IKM.

"Terakhir dari Disporapar yang mengusulkan bantuan sembako bagi 12.586 pelaku pariwisata yang terdampak PPKM. Jadi kira-kira kita siapkan Rp143,5 miliar. Sudah ada hitungan detailnya seperti itu," pungkasnya. (*)